

VOL. 20, NO. 1, MARET 2021

P - ISSN : 1693 - 6922

E - ISSN : 2540 - 7767

JURNAL LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi



J U R N A L LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

VOL. 20, NO. 1, MARET 2021

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NG LA WAK KERTOSO NO NG ANJUK

Vol. 20 No. 1 Maret 2021

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK



Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com



Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

CONTENTS

M. Nanda Fauzan <i>Munculnya Persepsi Masyarakat Muslim Pedesaan Terhadap Fenomena Wabah Covid-19</i>	1-16
Ali Muhsin dan Zainal Arifin <i>Implementasi Media Blood Circulation Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengidentifikasi Sistem Peredaran Darah Manusia Bagi Siswa Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Dero Kesamben Jombang</i>	17-32
Mahfud <i>Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia</i>	33-49
Fawait Syaiful Rahman <i>Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i)</i>	50-65
Muhammad Farhan Fauzan dan Agung Susilo Yuda Irawan <i>Wireless Attack : Menggunakan Tools Aircrack Pada Kali Linux Untuk Melakukan WPA Attack</i>	63-74
Muhammad Ivan, Shabila Tri Roosdiyana, dan Viqyh Allyvyantoro <i>Analisis Fitur New Normal Sebagai Display Shopee Dalam Membentuk Pola Konsumsi Pada Masa Covid-19</i>	75-85
Sawin M <i>Analisis Pembelajaran Daring Dalam Pencapaian Kompetensi Siswa Mata Pelajaran Sejarah Di SMAN 1 Kertosono Kab. Nganjuk</i>	86-100
Heni Widiанти <i>Strategi Peningkatan Literasi Digital Dalam Pembelajaran Matematika (Studi Kasus Peserta Didik SMAN 1 Tanjunganom Nganjuk)</i>	101-114
Wahyudi <i>Peran Pendidik Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Masyarakat 5.0</i>	115-129
Darius Ru'ung <i>Penguatan Tenaga Pendidik: Upaya Meminimalisir Problematika Pendidikan Nasional</i>	130-145
Kristin Ratnasari <i>Analisis Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Seni Budaya Di SMAN 1 Kertosono Nganjuk</i>	146-156

PENGUATAN TENAGA PENDIDIK: UPAYA MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:
Darius Ru'ung¹
email: dariusruung950@gmail.com

Abstract

Several national education problems such as low HDI, limited facilities and infrastructure, national education, and the problem of teaching staff require national education stakeholders to immediately formulate a strategy to minimize the problem of national education, one of which is to strengthen educators, this is based on the dominance of the role and the function of educators in national education. Efforts to encourage educators include; (i) Competency Development for Educators, an educator to have pedagogic, personality, social and professional competencies. The competence of educator has a major contribution to ensuring a quality process in institutions at all levels of education, and (ii) improving the institutionalization of educators and teaching staff in producing more competitive educators. Institutional forms of educators include associations, cooperatives, MGMP and so on. The main elements of education are teachers, students, and the education system. These three things are interdependent, but the teacher's factor seems to be the most decisive in the success of education.

Keywords: *national education problems, strengthening educators*

A. Pendahuluan

Dengan penyelenggaraan pendidikan nasional diharapkan Indonesia memiliki generasi emas pada tahun 2045, di mana pendidikan Nasional merupakan proses sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling dasar yakni: (i) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (ii) kognitif yang tercermin pada kapasitas piker dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (iii) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis dapat berkembang secara optimal.

¹Tenaga Pendidik di SMAN 1 Kertosono Kab. Nganjuk

Pentingnya pendidikan nasional tercermin dari sejarah berdirinya negara Indonesia sehingga *funding father* bangsa ini, menempatkan pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia (warga Indonesia), oleh karena itu Undang-Undang 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada negara bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.²

Jika melihat program-program pemerintah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional, baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupundaerah pada dasarnya sudah banyak dilakukan, misalnya saja pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengeluarkan kebijakan system zonasi dalam system penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Alasan utama yang dikemukakan adalah pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh untuk melakukan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan³. Kebijakan ini berdasarkan data empiris yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah.

Demikian dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan fungsi pemerintahan adalah pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk murid yang tergolong tidak mampu sebesar Rp. 400.000, 00 perorang dan juga menyalurkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 360.000,00 perorang, beasiswa tersebut pada umumnya peruntukkan untuk membeli perlengkapan sekolah siswa, beasiswa tersebut diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat menengah atas (SMA/ atau sederajat), selain itu upaya pemerintah daerah dibidang pendidikan Non Formal dengan cara penyelenggaraan pendidikan sekolah paket A, B, C dan juga program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional (KF), di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah maupun buta aksara, penyelenggaraan pendidikan Non

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

³Kompas, 31 Mei 2018, dalam Anindito Aditomo dan Nisa Felicia, *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015*, Kilas Pendidikan Edisi 17 | 19 Agustus 2018, 3

Formal di PKBM diupayakan setiap Kabupaten dan Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Belum lagi program-program beasiswa untuk studi lanjut program sarjana sampai dengan pasca sarjana, misalnya program 5000 doktor dari mora scholarship Kementerian Agama RI, Program 5000 Doktor merupakan salah satu langkah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik baik guru dan dosen dengan memberikan beasiswa studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri, program ini secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014 di Istana Negara.⁴ Demikian halnya dengan Kementerian Keuangan melalui unit khusus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah mengadakan program beasiswa studi lanjut magister dan doktor, melalui program beasiswa, LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister/doktoral untuk putra-putri terbaik Indonesia, pendanaan riset komersial/implementatif untuk mendorong inovasi, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.

Salah satu tugas pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Namun pendidikan di Indonesia selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru yang membuat pendidikan di Indonesia tidak berdaya saing. Masalah pendidikan di Indonesia antara lain, rendahnya kualitas pendidikan nasional, masalah pemerataan pendidikan, mutu pendidikan sampai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang pada tahun 2003, bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).⁵

Disisi lain pendidikan nasional juga menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak dapat dibendung lagi perkembangannya, di mana semakin cepatnya perkembangan TIK yang di bawa oleh era industri 4.0 menuntut setiap manusia dan institusi pendidikan untuk

⁴ Pedoman Beasiswa Program 5000 Doktor Dalam Negeri, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

⁵Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.), 5

selalu memperbaharui dirinya dengan cara-cara pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan perubahan itu sendiri. Dan seperti diketahui, tidak mudah untuk melakukan perubahan secara internal maupun eksternal dalam sebuah institusi pendidikan, tanpa dihadapkan pada berbagai isu rintangan dan resiko yang tidak kecil.

Pendidikan memang bukanlah persoalan yang mudah, bila ditanam sekarang maka baru dapat dirasakan hasilnya pada 10 hingga 20 tahun mendatang. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bersinergi untuk mewujudkan generasi emas 2045 (100 tahun Indonesia Merdeka). Persoalan-persoalan dapat dipecahkan bersama-sama dengan bersinergi, karenanya pendidikan yang bermutu harus terus diupayakan oleh semua pihak oleh semua *stakeholder* pendidikan. Guru merupakan kunci, mereka adalah mutiaranya *agent of change*, pelaku perubahan agar menghasilkan manusia Indonesia yang religius, cerdas, produktif, andal dan komprehensif melalui layanan pembelajaran yang prima terhadap peserta didiknya, sehingga terwujud generasi emas tahun 2045.⁶

Jika diamati secara sungguh-sungguh, tenaga pendidik sebenarnya berpotensi menawarkan berbagai kemungkinan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan. Melalui penguatan pendidik membantu meminimalisir problematika Pendidikan nasional, maka salah satu strategi nasional yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana penguatan pada tenaga pendidik, agar pendidikan nasional semakin relevan dengan kebutuhan dunia industri atau dunia nyata. Oleh karena itu kajian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana penguatan tenaga pendidik dapat menjadi salah satu alternatif meminimalisir problematika pendidikan nasional, yang dirumuskan dalam judul penelitian “*Penguatan Tenaga Pendidik: Upaya Meminimalisir Problematika Pendidikan Nasional*”.

B. Pembahasan

1. Problematika Pendidikan Nasional

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah memberikan gambaran arah dan tujuan Pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional berupaya untuk mencetak SDM yang unggul, SDM yang tidak hanya cakap secara akademik, namun juga memiliki nilai spiritual yang kuat, agar mampu bersaing dan menjawab tantangan perubahan zaman. Namun demikian perjalanan pendidikan nasional tidak selalu berjalan mulus, masih banyak permasalahan yang

⁶ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*, (Jakarta: 2017), 4

dihadapi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, terbukti dari masih banyaknya problematika Pendidikan Nasional.

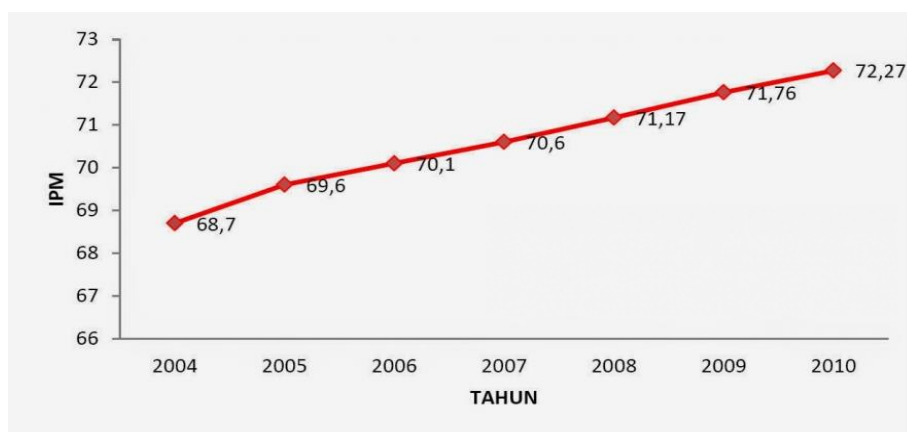
Beberapa problematika Pendidikan nasional dapat dipahami dari beberapa data berikut ini;

- a. IPM Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan Negara lain.

Peringkat kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan berada pada level terpuruk, hal ini terlihat dari posisi pendidikan nasional berada di bawah negara asia tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia, yang beberapa tahun silam Malaysia banyak menghadirkan tenaga-tenaga ahli dari Indonesia, tetapi sekarang yang terjadi adalah sebaliknya.⁷ Salah satu ukuran dari kualitas pembangunan manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan dasar manusia lainnya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).⁸

Data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kapita yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).⁹ Secara detail data IPM Indonesia dapat ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 1.1 IPM Nasional



Sumber: BPS, 2011

⁷ Tim Nasional Dosen Kependidikan, *Guru yang Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 67

⁸ Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

⁹ M. Shiddiq Al-Jawi, *Pendidikan Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya*, Disampaikan dalam Seminar Nasional " Potret Pendidikan Indonesia Antara Konsep, Reality dan Solusi" diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah dan Studi Islam (FUSI) Universitas Negeri Malang, Ahad 7 Mei 2006 20006

Data IPM yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif, selalu ada kenaikan setiap tahunnya, namun jika harus head to head dengan negara lain maka posisi Indonesia masih jauh berada dibawah negara asia tenggara lainnya, misalnya pada tahun 2015 IPM Indonesia berada diurutan ke 110, di bawah Thailand (93) dan Malaysia (urutan 62), tentu kita tidak bisa bersaing dengan negara Singapura yang berada di urutan 11 besar. Meskipun data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 IPM Indonesia 71,94 atau meningkat 0,03 persendaritahun 2019¹⁰, namun nilai IPM Indonesia belum bisa bersaing dengan negara lain.

IPM yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan bahwa IPM terbentuk salah satunya dari unsur pendidikan. Oleh karena itu rendahnya IPM juga merupakan salah satu problematika sektor pendidikan yang harus segera mendapatkan perhatian dari segenap pemangku kepentingan pendidikan termasuk dari pemerintah, rendahnya IPM akan akan berdampak buruk terhadap sektor pendidikan, diantaranya adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga harus mendatangkan produk dan tenaga ahli dari negara maju, selain itu rendahnya pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru.

b. Kesenjangan Pendidikan Nasional

Sebagaimana pemaparan pada pendahuluan bahwa UU 45 mengamanatkan kepada negara agar setiap warga Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, setidaknya setiap penduduk Indonesia mendapat pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun, mulai tingkat dasar atau Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat menengah atas atau Sekolah Menengah Atas (SMA), dan saat ini dengan perkembangan kebutuhan manusia akan pendidikan, pendidikan dimulai semenjak usia dini atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Amanat UU 45 ini berdasarkan pada kemajuan bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan, dan pendidikan merupakan modal utama untuk kemajuan suatu bangsa, sehingga pemerataan pendidikan menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan nasional.

Namun sayangnya kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti: sarana prasarana, sumber daya tenaga pendidik sampai dengan kesempatan memperoleh pendidikan, utamanya disebabkan demografi. Kesempatan memperoleh pendidikan antara mereka yang tinggal di kota dengan yang di Desa

¹⁰Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

terutama yang berada daerah terpencil akan sangat terlihat, anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan dengan fasilitas yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah pedesaan.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 jutasiswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan Pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumberdaya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

Randall Collins dalam bukunya *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification*, menilai bahwa pendidikan formal merupakan awal dari proses stratifikasi sosial. Di Indonesia, hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di bidang pendidikan antara lain:

- 1) Kualitas Lingkungan Sekolah. Faktor ini meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar yang mendukung seorang anak untuk mendapat pendidikan yang baik.
- 2) Kesempatan Memperoleh Pendidikan yang Berkualitas. Keterbatasan dari segi kualitas pengajar, budaya masyarakat, hingga kemudahan akses ke sekolah juga berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya seseorang untuk mendapat pendidikan yang berkualitas.
- 3) Kualitas Lulusan. Semakin baik kualitas lulusan di wilayah tersebut, makin besar pula kesempatan wilayah itu untuk menjadi lebih berkembang dan sejahtera.
- 4) Fasilitas Pendidikan. Hal ini juga mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru-siswa, dan kualitas guru.

Program-program untuk mengurangi ketimpangan sosial di bidang pendidikan juga menjadi perhatian oleh pemerintah, salah satunya adalah program Indonesia Mengajar dari Kemendikbud RI. Gerakan ini memfasilitasi lulusan universitas untuk mengajar sekolah dasar di daerah-daerah terpencil, tujuannya agar daerah-daerah tersebut berkesempatan mendapat kualitas pengajar yang serupa dengan yang ada di

daerah-daerah yang lebih maju. Selain itu, gerakan-gerakan mengajar anak jalanan dan *start up* pendidikan, yang dilakukan oleh pihak swasta juga banyak dikerjakan, namun pada prinsipnya semua program-program untuk mengurangi kesenjangan pendidikan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Rendahnya Kualitas Sarana Fisik Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki Gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.¹¹

Data tahun 2013 di atas tidak banyak berubah jika dibandingkan data dari balitbang Kemdikbud tahun 2018, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tahun : 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
SD	283.109	600.207	81.601	63.128	44.091	1.072.136
SMP	5.308	7.678	894	700	589	15.169
SMA	2.884	2.432	195	129	111	5.751
SMK	75.804	78.204	3.728	2,572	2.118	162.426

Sumber: diolah peneliti berdasarkan: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php>, 2021

Lebih jauh jika diperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada masih memiliki ketimpangan antar provinsi, di mana sekolah yang berada di kota besar cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai daripada sekolah yang ada di kota kecil atau di daerah pingiran. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia,

¹¹ M. Shiddiq Al-Jawi, *Pendidikan Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya*, 06 May 2006, diakses melalui: <http://blog.ub.ac.id/irfan11/files/2013/02/Pendidikan-Di-Indonesia-oleh-M.-Shiddiq.pdf>

dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting. Misalnya kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai, sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkandala. Memang harus diakui secara kasat mata upaya untuk menyediakan

d. Problematika Tenaga Pendidik

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat Pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. (pendidikan Indonesia: masalah dan solusinya)

Di Indonesia jumlah guru menurut data Kemendikbud ada sebanyak 3.015.315 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 2.294.191 guru berstatus PNS dan guru tetap Yayasan (GTY). Sedangkan sisanya sebanyak 721.124 guru berstatus guru tidak tetap (GTT) dan tidak bersertifikasi.¹² Dari 3 (tiga) juta guru tersebut tidak sedikit yang masih bermasalah, baik dari segi profesionalisme maupun kepribadian. Fakta lain

¹² M. Shiddiq Al-Jawi, *Pendidikan Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya*, 06 May 2006, diakses melalui: <http://blog.ub.ac.id/irfan11/files/2013/02/Pendidikan-Di-Indonesia-oleh-M.-Shiddiq.pdf>

menunjukkan Harus diakui tenaga kependidikan menempati tempat yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa, memainkan peranan fundamental untuk pembangunan pribadi dan social. Tetapi, Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50% guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi pendidikan nasional (SPN).¹³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dalam undang-undang tersebut semua calon guru wajib memiliki kualifikasi minimal sarjana atau diploma IV (empat) dan untuk menjadi pendidik profesional harus lulus pendidikan profesi. Dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 ditegaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa problematika pendidikan nasional di atas seperti rendahnya IPM, kesenjangan pendidikan, terbatasnya sarana prasarana serta problematika pendidik menuntut segenap stakeholder pendidikan nasional untuk segera merumuskan suatu strategi untuk menyelesaikan problematika-problematika pendidikan nasional. Sehingga pada tahun 2045 genap 100 tahun Indonesia merdeka atau 32 tahun lagi, kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta saat ini, kelak pada 2045, diharapkan akan menjadi generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.

2. Penguatan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik yang selanjutnya sering disebut sebagai guru dan dosen, pada prinsipnya memiliki pengertian yang luas. Namun dalam konteks jabatan, guru memiliki makna yang terbatas yaitu mereka yang profesinya mendidik pada lembaga pendidikan formal, dari pendidikan Dasar sampai menengah. Sementara mereka yang mengajar pada lembaga pendidikan tinggi disebut dosen.¹⁴ Menurut PP No. 74 Tahun 2008, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁵

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, pendidik yang bertugas memberikan pengajaran disebut dosen. Menurut UU No. 14 Tahun 2005, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

¹³ Tim Nasional Dosen Kependidikan. *Guru yang Profesional*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 201

¹⁴ Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012), 11.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen.

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu tenaga pendidik dikatakan sebagai salah satu komponen esensial dalam sistem pendidikan nasional mengingat peran dan fungsinya yang begitu besar.

Secara lebih rinci Jamal Ma'mur Asmani menyebutkan, bahwa ada beberapa fungsi dan tugas lain seorang guru, antara lain:

- 1) *Educator* (pendidik), tugas pertama guru adalah mendidik murid-murid sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang *educator*, ilmu adalah syarat utama. Membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti informasi, dan responsive terhadap masalah kekinian sangat menunjang peningkatan kualitas ilmu guru
- 2) *Leader* (pemimpin), guru juga seorang pemimpin kelas. Karena itu, ia harus bisa menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan kelas menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai seorang pemimpin, guru harus terbuka, demokratis, egaliter, dan menghindari cara-cara kekerasan
- 3) *Fasilitator*, sebagai fasilitator guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Sebagai fasilitator, guru tidak boleh mendikte anak didiknya untuk menguasai satu bidang. Anak harus dibiarkan mengeksplorasi potensinya dan memilih potensi terbaik yang dimiliki sebagai jalur hidupnya di masa depan. Seorang guru hanya boleh memberikan bimbingan, arahan, dan visi hidup ke depan, sehingga anak didik bersemangat mencari bakat unik dan potensi terbesarnya demi meraih impian hidup di masa depan.¹⁷

Tenaga pendidik baik dosen maupun guru merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan. Peran, tugas, dan tanggungjawab tenaga pendidik sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Guru dapat dikatakan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, waktu efektif yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, berinteraksi dan

¹⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.

¹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 39-42.

berkomunikasi, lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa potensi siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, dalam hal ini tentu saja perhatian guru. Guru diharapkan mampu membawa perubahan bagi siswa, terutama untuk membangkitkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar, yang pada akhirnya akan membawa siswa kepada keberhasilan.¹⁸ Jika dianalogikan dengan sekelompok tim sepakbola, atau basket, atau voli, atau kelompok-kelompok lainnya. Jika ingin menjadi sebuah tim yang kuat dan disegani oleh tim yang lainnya, sudah pasti tim itu harus memiliki kualitas pemain yang baik.

Oleh karena itu penguatan tenaga pendidik mutlak diperlukan antara lain;

a. Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pengutan kompetensi tenaga pendidik. Kompetensi tenaga pendidik, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi tenaga kependidikan memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses yang bermutu di lingkungan Lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Pada kondisi tenaga pendidik memiliki kompetensi yang ideal, maka; (i) merubah karakter peserta didik yang selama ini pasif menjadi aktif; dan (ii) bisa menguatkan modal sosial peserta didik.

Adanya jaminan mutu bagi tenaga kependidikan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif yang pada gilirannya mampu melahirkan lulusan yang berprestasi tinggi dan memiliki daya saing di dunia kerja. keberadaan tenaga kependidikan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan nasional dalam menjalankan proses pendidikan di Lembaga pendidikan. Beberapa prinsip dalam pengembangan kapasitas ialah (1) bersifat multi dimensi (2) berorientasi jangka panjang (3) melibatkan *stakeholder* (4) Mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah.¹⁹ Melalui penguatan kompetensi pendidik akan berimplikasi langsung terhadap hasil pendidikan nasional.

b. Perbaikan Kelembagaan Tenaga Pendidik.

Dalam banyak kasus, kelembagaan masih menjadi permasalahan tenaga pendidik, untuk itu kelembagaan tenaga pendidik sangat dibutuhkan dalam mencetak tenaga

¹⁸ Leonard, *Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru Dan Solusi Perbaikannya*, Jurnal Formatif 5(3): 192-201, 2015

¹⁹ Esen Pramudya Utama, *Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Peran Lembaga Pendidikan* Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/56454-ID-pengembangan-kapasitas-tenaga-pendidik-d.pdf>

pendidik yang lebih berdaya saing. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan pernyataan penting bahwa pembentukan kelembagaan tenaga pendidik pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan maupun tenaga pendidik yang unggul. Jika tenaga pendidik semakin sejahtera, maka secara otomatis berdaya saing tinggi, maka peran kelembagaan tenaga pendidik mutlak diperlukan.

Bentuk kelembagaan tenaga pendidik bisa berbagai macam, seperti asosiasi, koperasi, MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kelembagaan tenaga pendidik, maka dibutuhkan sebuah pengaturan kelembagaan agar ukuran organisasi dapat dengan sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik. Pengertian pengaturan kelembagaan adalah bagaimana mengelola organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dalam sektor pendidikan, tujuan pengaturan kelembagaan adalah agar dapat memperbaiki kekuatan anggota (pendidik) agar lebih produktif. Meski demikian, pengaturan kelembagaan yang dibentuk juga harus mempertimbangkan ambang ukuran (kapasitas) organisasi pendidik yang bersangkutan.

Untuk memaksimalkan peran kelembagaan pendidik dalam penguatan tenaga pendidik, maka dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, satu misal semenjak di sahkanya Kurikulum 2013, pada jenjang SMA sudah dibentuk MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). MGMP yang saat ini belum berperan secara maksimal dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik, oleh karena itu diperlukan revitalisasi lembaga (MGMP), agar peran utama dari MGMP dapat berjalan sebagaimana mestinya, diantara tujuan dari organisasi MGMP adalah, (i) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, (ii) Menjadi forum untuk menyetarakan kemampuan guru di bidangnya guna menunjang pemerataan peningkatan kegiatan belajar mengajar, dan (iii) Membantu guru untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pendidikan, misalnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan kurikulum, metodologi, dan sebagainya.

Unsur utama pendidikan adalah guru, siswa, dan sistem pendidikan. Ketiga hal ini saling bergantung, tetapi faktor guru terlihat paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan.²⁰ Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses, pembelajaran, yang

²⁰ Leonard, *Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru Dan Solusi Perbaikannya*, Jurnal Formatif 5(3): 192-201, 2015

diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.²¹ Dengan kata lain jika guru atau tenaga pendidik sudah memiliki tingkat kompetensi yang ideal serta memiliki kelembagaan yang dapat mengatasi problematika guru, maka akan dapat meminimalisir problematika pendidikan nasional.

C. Penutup

Dari pemaparan dan Analisa hasil penelitian di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan utama, yakni *Pertama*, Problematika Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional saat ini menghadapi beberapa problematika utama, antara lain: (i) IPM Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan Negara lain. Pada tahun 2015 IPM Indonesia berada di urutan ke 110, di bawah Thailand (93) dan Malaysia (urutan 62), tentu kita tidak bisa bersaing dengan negara Singapura yang berada di urutan 11 besar, rendahnya IPM menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia berada pada level memprihatinkan, rendahnya IPM akan berdampak buruk terhadap sektor pendidikan, diantaranya adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga harus mendatangkan produk dan tenaga ahli dari negara maju, selain itu rendahnya pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru.

(ii) Kesenjangan Pendidikan Nasional, Kesenjangan pendidikan terlihat dari fakta bahwa anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan dengan fasilitas yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah pedesaan. Program-program untuk mengurangi ketimpangan sosial di bidang pendidikan juga menjadi perhatian, namun hal tersebut diperlukan peran dari semua *stakeholder* pendidikan dan dilakukan secara sistematis dan massif, (iii) Terbatasnya Sarana dan Prasarana, jika diperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada masih memiliki ketimpangan antar provinsi, di mana sekolah yang berada di kota besar cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai daripada sekolah yang ada di kota kecil atau di daerah pingiran. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting. Misalnya kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai, sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkandala. Memang harus diakui secara kasat mata upaya untuk menyediakan, dan (iv) Problematika Tenaga Pendidik, di Indonesia jumlah guru menurut data Kemendikbud ada sebanyak 3.015.315 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 2.294.191 guru berstatus PNS dan guru tetap Yayasan (GTY). Sedangkan sisanya sebanyak 721.124 guru berstatus guru tidak tetap (GTT) dan tidak bersertifikasi.

²¹ Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1998), 72

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50% guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi pendidikan nasional (SPN).

Kedua, Penguatan Tenaga Pendidik. Dominasi peran dan fungsi tenaga pendidik dalam pendidikan nasional menuntut penguatan tenaga pendidik sebagai upaya meminimalisir problematika nasional, diantara dengan; (i) Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik, seorang tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tenaga kependidikan memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses yang bermutu di lingkungan Lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dan (ii) Perbaikan kelembagaan Tenaga Pendidik, kelembagaan tenaga pendidik berperan dalam mencetak tenaga pendidik yang lebih berdaya saing. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan kelembagaan tenaga pendidik dalam rangka menciptakan kesejahteraan maupun tenaga pendidik yang unggul. Bentuk kelembagaan tenaga pendidik bisa berbagai macam, seperti asosiasi, koperasi, MGMP dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kelembagaan tenaga pendidik, maka dibutuhkan sebuah pengaturan kelembagaan agar ukuran organisasi dapat dengan sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik. Untuk memaksimalkan peran kelembagaan pendidik dalam penguatan tenaga pendidik, maka dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, Unsur utama pendidikan adalah guru, siswa, dan sistem pendidikan. Ketiga hal ini saling bergantung, tetapi faktor guru terlihat paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adawiya, dkk. *Pendidikan Yang Berdaya Saing*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Anindito Aditomo, dan Nisa Felicia, *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015*, Kilas Pendidikan Edisi 17 | 19 Agustus 2018.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. *Pendidikan Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya*. 06 May 2006, diakses melalui: <http://blog.ub.ac.id/irfan11/files/2013/02/Pendidikan-Di-Indonesia-oleh-M.-Shiddiq.pdf>
- Badan Pusat Statistik (bps.go.id)
- Leonard, *Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru Dan Solusi Perbaikannya*, Jurnal Formatif 5(3): 192-201, 2015
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*, Jakarta: 2017.
- Kosim, Muhammad. *Pendidikan Guru Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara. 2012
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Supriadi, Dedi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. 1998
- Tim Nasional Dosen Kependidikan. 2016. *Guru yang Profesional*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen

<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php>, 2021

Pedoman Beasiswa Program 5000 Doktor Dalam Negeri, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Utama, Esen Pramudya. *Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Peran Lembaga Pendidikan*. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/56454-ID-pengembangan-kapasitas-tenaga-pendidik-d.pdf>